

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata merupakan sektor penting untuk mendukung perekonomian. Pariwisata juga sebagai sarana pengembangan sosial budaya dan mempromosikan citra bangsa ke luar negeri. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor yang dapat berkembang dengan cepat dan dianggap sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling penting. Sektor ini diharapkan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu (Anjelina, 2017). Indonesia sebagai negara dengan ribuan pulau beraneka keindahan alamnya dan penduduknya terdiri dari ratusan suku bangsa memiliki potensi wisata alam, sosial, dan budaya yang besar (Dahuri dalam Labolo, 2011). Luas daratan di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik (BPS, 2017) ialah 1.913.578,68 km² memiliki kekayaan kebudayaan dan kesenian masyarakatnya, dan keindahan alamnya yang menjadi daya tarik tersendiri. Dengan kondisi tersebut, maka potensi pariwisata yang dimiliki oleh Indonesia dapat menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan (Dayansyah, 2014).

Pengembangan pariwisata di Indonesia bukan hanya untuk meningkatkan perolehan devisa saja, tetapi pariwisata diharapkan dapat berfungsi sebagai katalisator pembangunan (Agent of Development). Pariwisata apabila dikembangkan secara baik dan terencana, dapat mempercepat proses pembangunan. Secara makro, pariwisata dapat meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja, penerimaan pajak, retribusi dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Nasional dan sekaligus akan memperkuat posisi Neraca Pembayaran (Anjelina, 2017). Namun, jika pengembangannya tidak dipersiapkan

dan baik, justru akan menimbulkan berbagai permasalahan yang menyulitkan atau bahkan merugikan masyarakat. Untuk meminimalisir dampak negatif dari pengembangan pariwisata, maka harus dikelola dengan kajian yang mendalam, yakni pendukungnya. Pendukung yang dimaksud adalah sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya budaya, dan sumber daya manusia (Hasanah, 2017).

Pengelolaan kegiatan pariwisata sangat diperlukan dalam rangka menahan wisatawan untuk tinggal lebih lama di daerah tujuan wisata dan bagaimana wisatawan membelanjakan uang sebanyak - banyaknya selama melakukan wisata. Makin lama wisatawan berada di suatu tempat wisata akan meningkatkan pengeluaran mereka, sehingga akan membangkitkan perusahaan jasa transportasi, hiburan, akomodasi, dan jasa lainnya. Salah satu pariwisata di Indonesia yang paling terkenal adalah pariwisata yang ada di Bali dan dijadikan sebagai *trourism icon* Indonesia. Tetapi sebenarnya tidak hanya pariwisata di Bali saja karena masih banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki objek wisata yang tidak kalah indahnya dengan pariwisata di Bali (Hutagalung, 2014). Pengelolaan potensi pariwisata yang dimiliki daerah dikelola oleh masing-masing daerah. Begitu juga halnya dengan Provinsi Jawa Timur yang memiliki banyak potensi dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata (Wardana, 2017). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menunjukkan bahwa kabupaten probolinggo memiliki berbagai kekayaan alam dan budaya yang sangat istimewa sehingga menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat (Damayanti, 2014). Dengan status otonom yang dimiliki, pemerintahan Kabupaten Probolinggo memiliki wewenang untuk mengembangkan potensi-potensi daerahnya, salah satu

diantaranya ialah potensi pariwisata sebagaimana yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo No 7 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan pariwisata yang dapat mendatangkan keuntungan bagi Kabupaten Probolinggo sendiri. Kabupaten Probolinggo sangat kaya akan potensi alam, budaya, dan pariwisata.

Wisata Pantai menjadi salah satu sektor unggulan di kabupaten Probolinggo karena memiliki banyak pantai dengan jenis ombak yang tenang sehingga sering dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Pemerintah telah mengatur pengelolaan kawasan pantai hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2014, tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang tujuannya:

1. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat, melalui peran serta masyarakat.

Salah satu diantara objek wisata pantai yang mulai dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Probolinggo adalah Pantai Duta. Penamaan Pantai Duta sendiri diambil dari letak lokasi pantai yaitu di Desa Randutatah Kecamatan Paiton.

Pantai ini memiliki pemandangan matahari terbenam yang begitu indah dan desiran angin pesisir di bawah pohon pinus. Menurut Abdul Azis selaku ketua Kelompok Tani Harapan, Pantai Duta pada awalnya hanya pesisir pantai yang terbengkalai, kemudian pada tahun 2013 Kelompok Tani Harapan yang didampingi PT.Jawa Power-YTL mulai menanam mangrove, cemara laut dan melakukan penghijauan hingga saat ini. Luas Pantai Duta adalah 12 Hektar, dimana 9 Hektarnya adalah kawasan konservasi dan sisanya adalah wisata sosial. Pantai Duta dibuka mulai tahun 2014 yang pada awalnya dikelola oleh Kelompok Tani Harapan hingga pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Probolinggo mengambil alih pengelolaan Pantai Duta. Pada tahun 2018 itu juga kawasan konservasi cemara laut dan mangrove Pantai Duta telah diserahkan-terimakan kepada Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui pimpinan PT. Jawa Power – YTL Jawa Timur Weichard Von Harrach kepada Wakil Bupati drs. H A Timbul Prihanjoko (InfoPasPro, 2018)

Pemerintah Kabupaten Probolinggo memasukkan Pantai Duta sebagai bagian masa depan wisata, dimana hal itu sesuai dengan Peraturan Bupati No 20 Tahun 2018 tentang penetapan destinasi wisata yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Pembenahan infrastruktur terus dilakukan termasuk melebarkan akses jalan dan fasilitas yang dilakukan secara bertahap. Dan bukan hanya itu, agar manajemen pengelolaan Pantai Duta dapat berjalan dengan optimal kedepannya pemerintah daerah menginginkan pengelolaan Pantai Duta di ambil oleh BUMDES yang kemudian pemerintah daerah akan membuat peraturan tersebut melalui Perdes. Pihak Kelompok Tani Harapan sendiri dilebur ke dalam BUMDES sehingga dapat bekerjasama dan lebih memajukan objek wisata Pantai Duta.

Tabel 1.1 Data kunjungan wisata Tahun 2017-2018 di Kabupaten Probolinggo

No	Nama Objek Wisata	Tahun 2017	Persentase	Tahun 2018	Persentase
1	Wisata Pantai Bentar	76.760	49%	79.744	51%
2	Wisata Pantai Duta	58.625	40%	88.918	60%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa pengunjung Pantai Duta Kabupaten Probolinggo dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami kenaikan secara drastis jika dibandingkan dengan pengunjung Pantai Bentar, hal itu memperlihatkan jika minat wisatawan untuk mengunjungi Pantai Duta mengalami peningkatan yang sangat baik. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Pantai Duta, pengelola Pantai Duta atau Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo perlu menambah wahana dan atraksi pariwisata setiap tahunnya serta menambah infrastruktur dan sarana prasarana untuk memaksimalkan potensi wisata Pantai Duta Kabupaten Probolinggo (Bahiyah, C., W. Hidayat., dan Sudarti., 2018).

Pantai Duta yang sebelumnya dipromosikan sebagai pusat mangrove oleh pemerintah daerah dan menjadi terkenal. Pantai Duta menjadi viral di media sosial, terbukti dengan membludaknya wisatawan 3 tahun terakhir. Pantai Duta sangat layak menjadi destinasi wisata masa depan, selain pantai yang tenang juga menjadi kawasan mangrove center. Apalagi lokasi yang mudah dijangkau, hanya berjarak 1 kilometer dari jalan Raya Pantura yang melintasi Kecamatan Paiton (Bahiyah C *et al.*, 2018).

Tabel 1.2 Data kunjungan wisatawan Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo

Tahun	Jumlah Pengunjung	Persentase
2016	18.431	11%
2017	58.625	35%
2018	88.918	54%

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo

Berdasarkan Tabel 1.2 diketahui bahwa pengunjung objek wisata Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami kenaikan secara signifikan, di tahun 2016 jumlah pengunjung mencapai 18.431 pengunjung dan di tahun selanjutnya jumlah pengunjung selalu mengalami kenaikan puncaknya pada tahun 2018 objek wisata Pantai Duta telah dikunjungi oleh 88.918 wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Berdasarkan jumlah pengunjung dari 2016 sampai tahun 2018 dapat dilihat bahwa keinginan wisatawan untuk berkunjung ke Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo sangatlah baik (Bahiyah C *et al.*, 2018). Salah satu upaya dalam mengembangkan objek dan daya tarik wisata Pantai Duta dapat dilakukan promosi dan pemasarannya, baik di dalam daerah maupun di luar daerah harus tetap ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu, dan efektif yaitu dengan cara memanfaatkan secara optimal kerja sama kepariwisataan.

Akan tetapi, dalam praktiknya Pantai Duta mengalami beberapa kendala permasalahan yang terjadi. Pada sisi Pemerintah permasalahan yang pertama yakni mengenai aspek kebijakan dari pengelolaan Pantai Duta Kabupaten Probolinggo, permasalahan yang pertama adalah objek wisata Pantai Duta belum memiliki payung hukum.

Sementara dari segi fasilitas, masih terdapat kekurangan sarana tempat pembuangan sampah sementara. Pascaliburan Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 Pantai Duta dipenuhi sampah yang diduga dibuang oleh wisatawan. Hal itu membuat Tim Quick Respon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melakukan peninjauan situasi Pantai Duta yang dipenuhi sampah tidak terurus di salah satu sudut sebelah selatan pantai. Penanganan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir (TPA) seharusnya dapat dikelola dengan baik oleh pihak pengelola Pantai Duta, diantaranya dengan mengawali menyediakan tempat pembuangan sementara, sehingga penanganan sampahnya bisa lebih mudah dan cepat.

Permasalahan yang masih muncul dalam program pengelolaan Pantai Duta ialah mengenai manajemen pengelolaannya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan sendiri memiliki beberapa masalah dimana pada saat rapat koordinasi terjadi adanya gesekan antara pihak pemerintah dengan masyarakat Kelompok Tani Harapan. Pihak masyarakat bersikukuh tetap ingin dilibatkan dalam pengelolaan Pantai Duta dikarenakan pihak masyarakat menurut Abdul Azis sebagai ketua Kelompok Tani Harapan merupakan perintis awal dalam mengelola Pantai Duta.

Pengorganisasian juga memiliki masalah yang muncul dimana semenjak diambil alih oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah melibatkan BUMDES dalam membentuk struktur kepengurusan tanpa adanya musyawarah dengan pihak Kelompok Tani Harapan. Sehingga menurut Abdul Azis sebagai ketua Kelompok Tani Harapan terjadi ketidaksesuaian terkait masalah sumberdaya manusianya. Misalnya saja dalam tugas penarikan retribusi parkir, BUMDES melibatkan karang

taruna, dengan alasan mengacu pada Perdes (Peraturan Desa) untuk melakukan pengelolaan wisata. Karang taruna sendiri tidak memiliki SK dari Bupati dan belum berpengalaman mengenai pengelolaan penarikan retribusi parkir. Dampaknya kepada pengunjung Pantai Duta yang semakin menurun drastis, karena mahalnnya parkir menurut Abdul Azis selaku ketua Kelompok Tani Harapan. Padahal saat dikelola oleh pihak Kelompok Tani Harapan retribusi parkir tidak semahal saat ini, dimana saat ini untuk parkir motor saja 5000 dan mobil 10.000. Pada saat pihak yang mengelola retribusi parkir hanya ditarik 2000 untuk motor dan 5000 untuk mobil. Hal ini sangat menunjukkan adanya ketidakcakapan sumberdaya manusianya dalam menjalankan tugas mengenai penarikan retribusi parkir. Seharusnya penugasan penarikan retribusi parkir, pihak Kelompok Tani Harapan yang sudah berpengalaman juga harus dilibatkan untuk bekerjasama.

Dalam hal pelaksanaan sendiri, pengelolaan Pantai Duta masih menemui masalah dimana pengelolaan pantai Duta antara pihak pemerintah daerah dan pihak CSR tidak bekerjasama dengan baik, menurut pihak CSR yaitu mas Wahyudi mengatakan adanya sering terjadi miskomunikasi dalam hal pembangunan fasilitas di Pantai Duta. Untuk pengawasan sendiri terkait pengelolaan Pantai Duta pemerintah daerah khususnya masih belum maksimal, dimana hal itu terbukti adanya masalah-masalah yang terjadi. Seharusnya pemerintah daerah lebih mengontrol situasi mengenai kerjasama pengelolaan Pantai Duta sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan dimulai dari hal perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan.

Atas dasar permasalahan tersebut, maka sangat penting untuk dilakukan suatu upaya kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat yaitu pihak CSR dan pihak

Kelompok Tani Harapan yang sejak awal memang pengelola Pantai Duta. Kerjasama antara pemerintah dengan pihak lain dapat dilakukan melalui pendekatan *collaborative governace*. Menurut Emerson, Kirk, Tina Nabatchi, and Stephen Balogh (2012) mereka menyatakan tata kelola kolaboratif secara luas sebagai proses dan struktur publik pengambilan keputusan dan manajemen kebijakan yang melibatkan orang secara konstruktif di seluruh batas-batas badan publik, tingkat pemerintahan, atau publik, swasta dan sipil ruang untuk melaksanakan tujuan publik yang tidak dapat dicapai.

Keberhasilan pengelolaan Pantai Duta tidak mungkin bila tidak melibatkan pihak selain pemerintah, dimana salah satunya yaitu perlu melibatkan *civil society* atau masyarakat. Menurut Adrian Devine, Emily Boyle dan Stephen Boyd (2011) kolaborasi saat ini merupakan bagian penting dari manajemen sektor publik. Lebih jauh mereka berpendapat bahwa kolaborasi antar organisasi menjadi semakin umum di sektor publik dan swasta. Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Duta mengindikasikan betapa pentingnya partisipasi masyarakat di dalamnya. Permasalahan yang terjadi mengenai pengelolaan Pantai Duta harus dikelola dengan bantuan partisipasi dari masyarakat. Dengan kata lain, pengelolaan Pantai Duta yang kompleks perlu kiranya bagi pemerintah untuk melibatkan peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Pantai Duta. Kolaborasi dengan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Duta dapat dilakukan melalui peran Kelompok Tani Harapan yang sejak awal telah mengelola Pantai Duta. Oleh karena itu, menurut Emerson *et al.*, (2012) proses kolaborasi terdiri dari dinamika kolaborasi, tindakan, serta dampak dan adaptasi pada proses kolaborasi.

Menurut Irawan pendekatan kolaboratif yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan dengan strategi melalui tiga tahap yakni proses identifikasi hambatan dan peluang, perumusan strategi, perencanaan kegiatan kolaboratif. Selain itu dalam ketiga tahap tersebut *stakeholder* yang terlibat harus mempertimbangkan dimensi-dimensi seperti kepercayaan antar *stakeholder*, alokasi sumber daya, komitmen terhadap proses, dan prinsip akuntabilitas. Dengan kata lain kolaborasi yang dilakukan dalam tataran perencanaan yang bersifat strategis untuk pelaksanaan kolaborasi yang dilaksanakan antar *stakeholder* (Irawan, Deny. 2017).

Dengan adanya kerjasama melalui pendekatan *collaborative governance* tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala-kendala yang dialami pemerintah Kabupaten Probolinggo dalam pengelolaan wisata Pantai Duta dapat diselesaikan bersama dengan pihak lain, yaitu pihak swasta atau CSR dan masyarakat melalui Kelompok Tani Harapan. Lebih lanjut lagi dengan pendekatan *collaborative governance* terdapat kerangka kerja yang terdiri dari beberapa tahapan seperti dinamika kolaborasi, kegiatan kolaboratif, dan hasil sehingga dapat dijadikan model kerjasama dalam mengatasi permasalahan pengelolaan wisata Pantai Duta Kabupaten Probolinggo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana model *collaborative governance* antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Duta Kabupaten Probolinggo?

2. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam model *collaborative governance* antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Duta Kabupaten Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai model *collaborative governance* antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Duta Kabupaten Probolinggo.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam model *collaborative governance* antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Duta Kabupaten Probolinggo.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan dua manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Akademis
 - a. Menambah referensi ilmiah sehingga bermanfaat untuk pengembangan mengenai kajian ilmu pemerintahan khususnya dalam aspek mengenai kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pantai baik bagi kalangan akademisi maupun masyarakat luas.
 - b. Menjadi rujukan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang kedepannya akan membahas model kerja sama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pantai. Khususnya model kolaborasi yang dilakukan dalam perspektif *collaborative governance*.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan masukan kepada Pemerintah, khususnya Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan jajaran Organisasi Perangkat Daerahnya serta *stakeholder* lain seperti masyarakat dan sektor swasta dalam konteks kolaborasi dalam pengelolaan pantai yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo.
- b. Dapat menginspirasi bagi pemerintah daerah lainnya untuk menerapkan konsep yang sama dalam melakukan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pantai di suatu daerah yang mana tidak hanya menuntut peran aktif pemerintah saja, namun juga aktor lain seperti partisipasi dari masyarakat melalui Kelompok Tani Harapan.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual memberikan penjelasan yang singkat dan jelas mengenai konsep yang akan digunakan sebagai perspektif dalam suatu penelitian (Irkham, 2018). Oleh karena itu, peneliti perlu mendefinisikan beberapa konsep yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. *Collaborative Governance*

Collaborative Governance menurut Emerson *et al.*, menyatakan bahwa pengelolaan kolaboratif adalah suatu rangkaian proses dimana penentuan kebijakan publik dan pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan banyak pihak dari beberapa organisasi atau institusi baik itu dari lembaga pemerintah sendiri, masyarakat sipil, ataupun pihak swasta. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen yang terkait baik individu, lembaga dan atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. Nilai-nilai yang mendasari sebuah kolaborasi adalah tujuan yang

sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. (CIFOR/PILI dalam Haryono, 2012)

2. Pengelolaan Pariwisata

Pengelolaan dalam kamus besar bahasa Indonesia di definisikan sebagai berikut (1) Proses, cara, perbuatan mengelola, (2) Proses melakukan perbuatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, (3) Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi (4) Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan pariwisata haruslah pengelolaan yang berkelanjutan untuk menjadikan pariwisata tersebut sebagai daya tarik bagi wisatawan. Menurut Peraturan Menteri Pariwisata No 14 Tahun 2016 pengelolaan berkelanjutan adalah pengelolaan yang mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia saat ini, tanpa harus mengorbankan potensi pemenuhan kebutuhan dan aspirasi manusia di masa yang akan mendatang.

3. Wisata Pantai

Pengertian tentang wisata dapat dilihat dalam Undang - Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Pantai adalah perbatasan antara daratan dan laut, sedangkan laut adalah kumpulan air dalam jumlah banyak yang membagi daratan atas benua-benua dan pulau-pulau. Jadi, wisata pantai dapat diartikan sebagai wisata yang memanfaatkan

potensi sumber daya alam pantai beserta komponen pendukungnya, baik alami maupun buatan atau gabungan keduanya itu (Simon dalam Musyafa', 2014).

F. Definisi Operasional

Menurut Silalahi, definisi operasional merupakan kondisi-kondisi, bahan-bahan, dan prosedur-prosedur yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi atau menghasilkan kembali satu atau lebih acuan konsep yang harus didefinisikan (Silalahi, 2012). Adapun variabel-variabel yang akan didefinisikan secara operasional oleh peneliti mengenai :

A. Kolaborasi pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo dengan pendekatan *collaborative governance*

1. Kondisi awal sebelum pelaksanaan kolaborasi pengelolaan Pantai Duta
2. Dinamika dalam proses kolaborasi pengelolaan Pantai Duta
 - a. Dialog dan pertemuan antara Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan pihak CSR dan masyarakat atau kelompok Tani Harapan
 - b. Motivasi bersama antara Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan pihak CSR dan masyarakat atau kelompok Tani Harapan
 - c. Kapasitas dalam proses kolaborasi antara Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo dengan pihak CSR dan masyarakat atau kelompok Tani Harapan
3. Kegiatan kolaborasi dalam pengelolaan Pantai Duta
4. Hasil dari proses kolaborasi dalam pengelolaan Pantai Duta

B. Faktor penghambat kolaborasi dalam pengelolaan Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo

1. Kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo
2. Sulitnya proses koordinasi antar *stakeholder*
3. Tantangan komitmen *stakeholder* dalam proses kolaborasi

G. Metode Penelitian

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang dan pelaku yang dapat diamati (Moleong, 2008). Adapun langkah-langkah metode yang digunakan dalam mendukung penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, pengertian penelitian deskriptif menurut Sugiyono adalah “Penelitian deskriptif biasanya dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2008). Penelitian yang berupa diskriptif diharapkan hasil penelitiannya dapat memberikan gambaran yang nyata perihal kondisi di lapangan dan tidak hanya sebagai sajian data. Selain itu, penelitian deskriptif ini diharapkan agar penulis yang akan mendeskripsikan tulisannya mengenai model *collaborative governance* pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo dapat lebih peka dan bisa menyesuaikan diri dengan banyak penajaman dalam proses penggalian data di lapangan.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber informasi yang biasanya digunakan oleh peneliti sebagai bahan pokok kajian untuk melaksanakan penelitian. Dimana sumber data tersebut berupa informasi akurat terkait dengan data yang dibutuhkan untuk penelitian. Menurut Sugiyono terdapat dua sumber data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif yaitu sumber data primer atau sekunder (Sugiyono, 2008).

a. Data Primer

Data primer adalah suatu informasi yang biasanya diperoleh dari sumber pertama, yakni berupa hasil observasi dan hasil wawancara dengan informan penelitian yang relevan, tepat dan akurat supaya mendapatkan data dari lokasi penelitian dengan narasumber yang bisa dipercaya. Sumber data pertama tersebut diperoleh langsung dari Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo, karyawan perusahaan PT YTL Jawa Power, dan ketua Kelompok Tani Harapan Desa Randutata. Sehingga, dapat mempermudah peneliti dalam mencari informasi dan bahan data yang dibutuhkan selama penelitian. Dikatakan demikian, karena peneliti berhadapan langsung melalui kegiatan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait langsung dalam pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan Pantai Dura Kabupaten Probolinggo.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang biasanya diperoleh dan dikumpulkan dari pihak kedua atau secara tidak langsung yang digunakan untuk pendukung data primer. Data yang didapatkan biasanya dalam bentuk data yang sudah jadi atau sudah dikelola oleh instansi, lembaga, atau bahkan peneliti terdahulu yang sesuai

dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi salinan perda, profil instansi atau lembaga terlibat yang biasanya diperoleh dengan dokumentasi. Selain itu data sekunder bisa berasal dari jurnal-jurnal atau buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengambilan Data

Keberadaan data menjadi suatu hal penting dalam penelitian, di mana data tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar untuk menjawab rumusan permasalahan dalam penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian diantaranya :

1. Observasi

Observasi adalah berupa metode pengumpulan data dengan melaksanakan kegiatan pengamatan. Peneliti mengamati secara langsung ke lokasi penelitian langsung yaitu di Dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo, kantor Perusahaan PT YTL Jawa Power, dan rumah Ketua Kelompok Tani Harapan Desa Randutata untuk melihat bagaimana situasi, kondisi dan aktifitas yang terjadi dilapangan, sehingga mendapatkan data-data relevan dengan fokus dan masalah yang diteliti.

2. Wawancara

Wawancara kualitatif adalah salah satu teknik dalam mengumpulkan data dan informasi. Yang mana, pengambilan data biasanya diikuti dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara (*interview guide*). Tujuan dilakukannya wawancara agar mendapatkan informasi akurat dan langsung dari narasumber langsung yaitu pada Dinas Pariwisata Kabupateng Probolinggo, karyawan Perusahaan PT YTL Jawa Power, dan ketua Kelompok Tani Harapan Desa Randutata.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data sekunder yang mana data terkait dengan obyek penelitian sehingga dapat digunakan dan merupakan data terkait aktivitas operasional yang digunakan.

4. Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan obyek penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. Subjek penelitian dipahami sebagai pihak atau orang yang nantinya menjadi sampel dalam penelitian dan menjadi pihak yang terwawancarai atau informan. Penentuan orang yang diwawancarai dapat dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono,2008). Pada saat mengembangkan sebuah *purposive sampling*, peneliti biasanya menggunakan pengetahuan dan pemahamannya tentang suatu kelompok untuk memilih subjek yang mewakili (Berl, 2001). Oleh karena itu, pengambilan sampel terhadap penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan cara *purposive sampling*.

Peneliti menentukan beberapa informan atau subjek penelitian yang dianggap menguasai dan mampu menjawab berbagai hal terkait dalam penelitian ini yakni sebagai berikut ini:

- a) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- b) Staf pegawai Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- c) Perusahaan PT YTL Jawa Power
- d) Ketua Kelompok Tani Harapan

5. Lokasi Penelitian

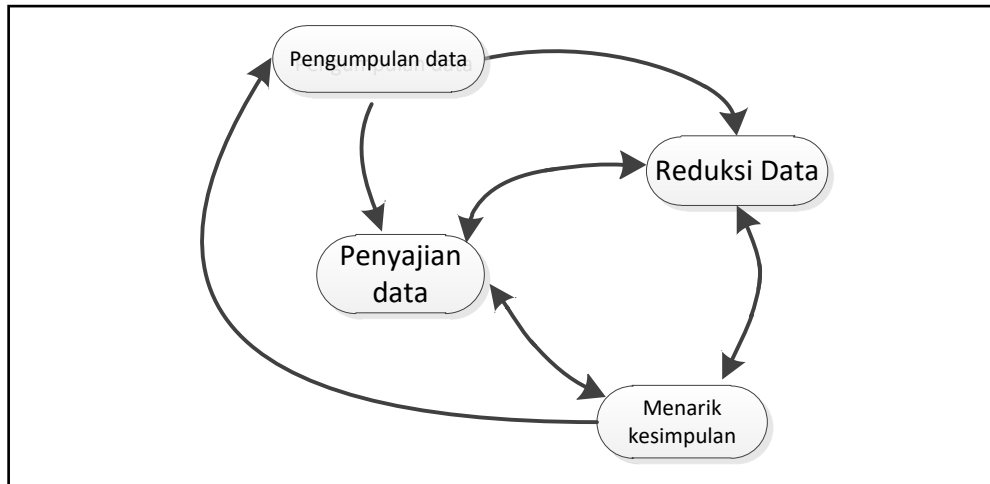
Penelitian ini dilaksanakan di beberapa lokasi seperti di ruangan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, kantor

perusahaan PT YTL Jawa Power, sekretarian atau kantor Kelompok Tani Harapan setempat, serta lokasi-lokasi lain yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu kegiatan terstruktur dalam mengelompokkan informasi dan data yang didapat dan saling berhubungan antar bagiannya. Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Karena jenis penelitian ini deskriptif kualitatif, peneliti akan menggunakan analisis data menurut oleh Miles dan Huberman. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2008), megemukakan aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus menerus hingga tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Analisis data dalam penelitian ini dilaksanakan pada saat pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban yang disampaikan oleh narasumber diwawancarai atau informan setelah dianalisis dirasa kurang memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu sehingga mendapatkan data atau informasi yang lebih kredibel. Analisis data Miles dan Huberman dalam model ini terdapat empat jenis kegiatan analisis dan pengumpulan data itu sendiri yang merupakan siklus dan interaktif. Adapun skema menurut Miles dan Huberman yang biasanya dilakukan dalam menganalisis data sebagai berikut :



Gambar 1.1 Teknik analisis Data Kualitatif Model Interaktif
Sumber: Miles dan Huberman, 1992:20

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah bagian terpenting dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada saat penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan studi dokumentasi (Bungin, 2003). Proses pengumpulan data dapat dilakukan pada saat pra penelitian dan pada saat penelitian. Kegiatan pengumpulan data ini dilakukan di lokasi penulis melakukan penelitian diantaranya adalah Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, kantor perusahaan PT YTL Jawa Power, sekretarian atau kantor Kelompok Tani Harapan setempat, serta lokasi-lokasi lain yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Pada kegiatan ini tidak ada waktu secara jelas dalam menentukan batas akhir dari pengumpulan data di lapangan, karena sepanjang penelitian masih berlangsung maka selama itulah pengumpulan data-data yang dibutuhkan oleh peneliti akan terus dilakukan.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses merangkum, memilah, dan memfokuskan data yang telah didapatkan oleh penulis di lokasi penelitian di Dinas Pemuda, Olahraga,

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, kantor perusahaan PT YTL Jawa Power, sekretarian atau kantor Kelompok Tani Harapan setempat, serta lokasi-lokasi lain yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.

Biasanya, dalam proses ini akan dilakukan penarikan rangkuman sebagai inti penelitian yang berguna dalam mempertajam analisis dan pengkategorian terhadap data di lapangan dengan data penelitian. Dengan itu, peneliti memperoleh gambaran secara jelas dan tepat agar mempermudah peneliti untuk tetap berada pada data jalan penelitian.

c. Display Data

Penyajian data adalah pengorganisasian dari hasil reduksi data yang telah tersusun mengenai model *collaborative governance* pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Bungin, 2003). Biasanya penyajian data dilakukan dalam bentuk naratif, bagan, bahkan diagram alur.

d. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan Data merupakan tahapan terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif model interaktif. Pada tahap ini penarikan kesimpulan dari data model *collaborative governance* pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan Pantai Duta di Kabupaten Probolinggo yang telah diperoleh di lapangan Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, kantor perusahaan PT YTL Jawa Power, sekretarian atau kantor Kelompok Tani Harapan setempat, serta lokasi-lokasi lain yang sesuai dengan kebutuhan

penelitian ini, dan tentunya telah di analisis melalui penyajian data. Kesimpulan data sendiri ialah proses verifikasi dari data-data yang telah dipilah pada tahap sebelumnya yang kemudian akan disimpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian (Bungin, 2003).

